

SUATU TINJAUAN TENTANG SISTEM EKONOMI INDONESIA

Pande Radja SILALAH

PENDAHULUAN

Falsafah atau pandangan hidup suatu bangsa akan menentukan bentuk dan corak kehidupan bernegara dari bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa tersebut akan menentukan sistem, baik sosial, politik maupun ekonomi, di dalam mana kehidupan bernegara akan berlangsung atau di dalam mana pola hubungan antar pelaku akan berlangsung.

Sistem yang cocok dengan suatu bangsa, pada hakekatnya harus didasarkan kepada pandangan hidup dari bangsa yang bersangkutan, atau ia harus menjelma sesuai dengan pandangan hidup dari bangsa tersebut. Dengan demikian, mewujudkan sistem yang dimaksudkan bukan merupakan pekerjaan pemilihan terhadap sistem yang sudah ada, walaupun dalam kenyataannya ia akan berbentuk serupa dengan sistem yang berlaku di dalam masyarakat lainnya. Ini memberi gambaran, bahwa bukan tidak mungkin suatu negara belum menemukan sistem yang cocok, yang berarti bangsa yang bersangkutan masih perlu merumuskannya.

Bila setiap negara di dunia mewujudkan sistem yang sesuai dengan pandangan hidup bangsanya, maka segera tergambar bagi kita betapa banyak sistem yang akan terwujud. Dan di antara sistem-sistem ini akan terdapat perbedaan maupun persa-

maan. Persamaan tersebut menggambarkan atau sebagai bukti terdapat persamaan pandangan hidup di antara mahluk manusia. Sedang perbedaan di dalam sistem dapat diartikan selain menggambarkan perbedaan dalam pandangan hidup, juga menggambarkan ciri khas dari sesuatu bangsa.

Tetapi celakanya, di dalam kehidupan di dunia sekarang ini, perbedaan di dalam sistem sering menimbulkan pertikaian. Ini sebagai akibat dari kenyataan, dalam kehidupan bernegara, saling ketergantungan antar bangsa di dunia sudah merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Sedang di dalam kehidupan saling ketergantungan tersebut, selalu timbul usaha manipulasi terhadap hubungan yang ada.

Kalau kita mengamati perkembangan kehidupan bernegara dari bangsa-bangsa di dunia, di satu pihak akan diketemukan, suatu negara sering mengalami kegoncangan, karena sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan memang pada dasarnya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsanya atau tidak sesuai lagi dengan pandangan hidup masyarakatnya. Tidak sesuai lagi, karena nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat telah mengalami perubahan sebagai akibat dari perkembangan yang telah dicapai. Di lain pihak kita akan menemukan, tidak jarang, pengetahuan masyarakat yang kurang memadai tentang sistem yang dianut oleh bangsanya yang menyebabkan kegoncangan yang dimaksudkan.

Dari berbagai macam sistem, tidak jarang bahkan sering, kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa yang menjadi sumber ketidak stabilan, atau walaupun kestabilan dapat dipertahankan, keseluruhan aksi yang berlangsung di dalam sistem tersebut tidak dapat memberi hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam perputarannya dapat melahirkan opini yang menyalahkan sistem yang dianut, pada hal pada hakikatnya sistem tersebut adalah merupakan perwujudan pandangan hidup dari bangsa yang bersangkutan.

ANALISA

Dengan demikian kiranya menjadi jelas, betapa penting dan betapa hakiki sifatnya anggota masyarakat mengetahui sistem ekonomi dari bangsanya.

Demikian halnya dengan masyarakat Indonesia, secara terbuka kita perlu mengakui, sebahagian besar anggota masyarakat masih kurang mengetahui sistem ekonomi yang kita anut. Bahkan kiranya tidak berlebihan bila dikatakan, banyak di antara anggota masyarakat kita yang sama sekali tidak memahaminya. Ini memberi gambaran betapa besar hambatan-hambatan yang kita alami dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan betapa berat tugas yang harus dipikul oleh para pemimpin-pemimpin masyarakat.

Para pemimpin masyarakat telah berhasil merumuskan dasar dan pangkal tolak dari sistem ekonomi yang kita anut yang perwujudannya telah dituangkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara. Tetapi pemasyarakatan kembali rumusan pandangan hidup bangsa ini, ternyata belum berhasil sepenuhnya. Memasyarakatkan kembali rumusan pandangan hidup tersebut, memasyarakatkan kembali sistem ekonomi yang kita anut perlu diinsyafi adalah sangat penting. Karena hanya dengan demikian anggota masyarakat dapat mengetahui bagaimana dan dengan bagaimana mereka akan berlakon. Dan di lain pihak dengan usaha seperti itu masyarakat diharapkan akan dapat menginsyafi fungsinya serta menjadi cinta terhadap sistem yang dimaksudkan.

Usaha memasyarakatkan kembali sistem ekonomi yang telah dirumuskan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan memberi penerangan kepada masyarakat. Penerangan tersebut dapat bersifat sempit tetapi dapat juga bersifat luas. Bersifat sempit dimaksudkan, bila materi penerangan yang akan diberikan hanya terbatas kepada sistem yang dianut, dan bersifat luas, bila materi yang diberikan di samping menyangkut sistem yang dianut juga menyangkut sistem lainnya yang dianggap ada hubungannya. Sejak pemasyarakatan dimaksudkan juga untuk menumbuhkan dan mempertebal rasa kecintaan di dalam diri

para anggota masyarakat, dapat dikatakan penerangan dengan sifat yang disebut terakhir inilah kiranya yang lebih tepat.

Memang harus diakui dengan menerapkan bentuk penerangan yang bersifat luas seperti yang dimaksudkan, mungkin akan menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki. Berbagai macam alasan yang tentunya dapat diterima, seperti belum memadainya daya urai dari pada anggota masyarakat atau banyaknya waktu yang dibutuhkan, dapat menyebabkan para anggota masyarakat berpendapat, sistem yang dianut oleh negara lain adalah lebih baik. Tetapi bila kita yakin sistem ekonomi yang telah dirumuskan adalah benar-benar merupakan perwujudan dari pandangan hidup bangsa kita, kiranya kita tidak perlu merasa ragu-ragu memilih dan menerapkan metode yang demikian. Yang kita butuhkan adalah kewaspadaan untuk menghadapi dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi, atau yang pada hakekatnya tidak dapat diterima.

Dalam kerangka pemikiran seperti itu, tulisan ini akan mencoba membahas sistem ekonomi Indonesia, sesuai dengan yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara. Dengan beranggapan bahwa tulisan ini, merupakan awal dari serangkaian usaha memasyarakatkan kembali sistem ekonomi Indonesia dan sebagai pelengkap terhadap tulisan-tulisan yang mendahuluinya, maka pembahasan yang dikemukakan akan bersifat umum, atau hanya mengemukakan masalah-masalah pokok yang dianggap penting. Sejalan dengan itu, maka tulisan ini dibagi ke dalam enam bagian pokok yaitu: Pertama, menyangkut pemenuhan kebutuhan dan perlunya sistem dalam usaha pemenuhan kebutuhan tersebut. Kedua, menyangkut sistem ekonomi kapitalis murni. Ketiga menyangkut sistem ekonomi kapitalis modern. Keempat dan kelima masing-masing menyangkut sistem ekonomi komunis dan sosialisme modern. Keempat bagian yang disebut terakhir ini dibahas karena dianggap perlu sebagai bahan pembandingan, sehingga sistem ekonomi Indonesia yang diuraikan dalam bagian keenam, akan lebih mudah untuk dimengerti dan diresapkan di dalam hati.

ANALISA

I. PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PERLUNYA SISTEM

Manusia hidup di dalam masyarakat pada tingkat tertentu dari perkembangan sejarah dan mempunyai bermacam-macam kebutuhan. Beberapa kebutuhan ini merupakan kebutuhan badaniah, yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidup. Kebutuhan lain berasal dari kenyataan bahwa manusia hidup bersama di dalam suatu masyarakat, ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai kumpulan faktor, yang dalam dirinya membentuk apa yang dinamakan kebudayaan suatu masyarakat.

Dalam masyarakat yang atheis, kebutuhan manusia dimaksudkan hanya mencakup kedua macam kebutuhan seperti yang disebutkan di atas. Tetapi oleh mereka yang ber-Ketuhanan seperti masyarakat Indonesia, di samping kedua macam kebutuhan tersebut, diakui adanya kebutuhan yang timbul sebagai hasil hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dalam tingkat pertama perlu dicamkan di dalam hati, karena segala persoalan atau pembahasan yang menyangkut ekonomi Indonesia, sistem maupun segala peraturan-peraturan yang berlaku dan diperuntukkan baginya akan bertitik tolak dari ketiga macam kebutuhan tersebut. Di samping itu perlu disadari, "usaha pemenuhan" dan "pemenuhan kebutuhan-kebutuhan" itu sendiri dapat berjalan berbarengan dan saling menunjang. Tetapi tidak jarang menjadi bertentangan satu sama lain. Bila hal yang disebut pertama yang terjadi, jelas ia tidak akan menimbulkan permasalahan. Tetapi bila yang disebut terakhir yang terjadi, maka usaha penanggulangannya mungkin tidak akan segampang seperti yang mungkin terpikirkan sebelumnya secara teoritis. Masalahnya mungkin saja bukan hanya menuntut pemecahan dengan mengorbankan suatu bentuk kebutuhan demi memenuhi kebutuhan lainnya. Tetapi mungkin ia menuntut pemecahan dalam bentuk tindakan yang akibatnya dapat menimbulkan kejutan kepada sebahagian anggota masyarakat, dan tindakan ini memang tindakan yang tidak dapat dihindarkan.

Dengan demikian perlu disadari secara penuh, bahwa masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah lebih rumit sifatnya bila dibandingkan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang atheis; adalah lebih rumit sifatnya bila dibandingkan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara yang masyarakatnya ber-Ketuhanan, akan tetapi berpendapat bahwa masalah pemuasan kebutuhan yang timbul sebagai akibat hubungan antara manusia dengan penciptanya adalah masalah orang-perorang.

Kebutuhan manusia dalam bentuk atau sifatnya dapat berbentuk perorangan atau berbentuk kolektif, seperti kebutuhan akan jaminan keamanan atau beberapa jenis suguhan lainnya yang merupakan akibat langsung dari kenyataan bahwa manusia hidup bersama di dalam suatu masyarakat. Ini berarti yang dimaksudkan bukan seperti kehidupan ekonomi dari Robinson Crusoe. Karena dalam kenyataan hidup perihal seperti itu hampir tidak mungkin terjadi, atau walaupun itu akan terjadi, ekonominya akan merupakan sistem yang terisolasi dan bukan merupakan bagian dari ekonomi masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan, manusia melakukan usaha produksi. Produksi merupakan kegiatan manusia dengan mengubah sumber-sumber yang ada menjadi pemuas kebutuhan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan bertujuan. Dan kesadaran serta adanya tujuan tersebutlah yang membedakan manusia dengan binatang. Produksi di dalam suatu masyarakat ekonomi adalah suatu proses di dalam mana para anggota masyarakat bekerja sama. Kerja sama dalam hal ini menjadi penting artinya, karena dalam banyak kesempatan, ia akan memberi hasil yang lebih besar bila dibandingkan dengan perjumlahan hasil usaha yang dilakukan secara orang-perorang. Untuk mencapai efisiensi dalam produksi dibutuhkan spesialisasi dalam fungsi. Sehingga di dalam prosesnya dengan adanya spesialisasi dalam fungsi tersebut, para anggota masyarakat menjadi saling bergantung satu dengan yang lain. Tetapi saling ketergantungan di antara anggota masyarakat di dalam proses kerja sama raksasa ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Ro-

binson Crusoe mengetahui keterangan-keterangan penting yang dia butuhkan dan mengalokasikan tenaga kerja serta sumber-sumber di dalam suatu keputusan yang menyeluruh. Tetapi di dalam ekonomi sosial, keputusan menyeluruh yang demikian tidak mungkin lagi. Tidak akan ada seorangpun yang akan mengetahui semua data dari sumber-sumber yang tersedia, teknik produksi dan keseluruhan kebutuhan daripada anggota masyarakat. Sehingga dengan demikian dibutuhkan adanya organisasi.

Untuk mengorganisasi produksi dan untuk mendistribusikan hasil produksi kepada anggota masyarakat, secara sadar atau tidak sadar akan dihadapi berbagai macam masalah yang harus dipecahkan. Demikian juga halnya, dengan terciptanya spesialisasi dan kerja sama, tercipta juga hubungan sosial. Sudah barang tentu terdapat bermacam-macam hubungan sosial, misalnya, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah yang merupakan hasil dari penggunaan kekuatan politik; hubungan para guru dengan murid yang timbul sebagai hasil dari proses pengajaran. Hubungan sosial yang muncul di dalam proses ekonomi berbeda dengan hubungan sosial lainnya. Ia terjelma dalam hubungannya (dalam hal ini manusia) dengan obyek material yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ia menjelma dalam hubungannya dengan benda-benda konsumsi dan hubungan yang terjadi dalam bentuk seperti ini dinamakan hubungan ekonomi.

Untuk dapat mengerti sistem hubungan sosial yang muncul dalam proses produksi, pertama kita harus mengambil daripadanya beberapa hubungan dasar tertentu yang menentukan perilaku dari keseluruhan hubungan yang berbelit-belit atau rumit sifatnya. Hubungan dasar muncul dari pemilikan alat-alat produksi. Pemilikan ini bukan hanya sekedar berarti kepunyaan. Ia merupakan kekayaan yang diakui oleh para anggota masyarakat, dikukuhkan oleh norma sosial yang diakui kesyahannya dalam bentuk hukum dan peraturan-peraturan dan dilindungi oleh adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan sosial yang dimaksudkan. Pemilikan alat produksi akan menen-

tukan bagaimana ia digunakan dan selanjutnya menentukan bentuk kerja sama yang akan berlaku. Bentuk pemilikan alat-alat produksi membentuk dasar daripada prinsip-prinsip organisasi, hubungan produksi dan distribusi.

Seperti diketahui alat-alat produksi bukan hanya mencakup tanah dan modal, akan tetapi tenaga kerja manusia juga termasuk di dalamnya. Dengan demikian perhatian terhadap yang disebut terakhir ini perlu diberikan, karena produksi itu sendiri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini terlihat manusia di satu pihak adalah pemilik dan di lain pihak "dapat" menjadi alat yang dimiliki oleh manusia lainnya atau badan lain di luar dirinya. Kemungkinan ini akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana kemerdekaan manusia harus ditempatkan di dalam hubungan sosial yang timbul dari proses produksi tersebut. Demikian halnya dengan alat-alat produksi selain tenaga kerja, karena pemilikan akan menentukan bagaimana ia digunakan, maka dalam hubungan sosial ia memerlukan pengaturan. Dan karena segala kegiatan yang dilakukan pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka cara pemenuhan kebutuhan tersebut juga memerlukan pengaturan. Keseluruhan pengaturan terhadap yang disebut di atas ini akan melahirkan sistem yang selanjutnya akan dibahas secara lebih terperinci di dalam bagian berikut ini.

Untuk dapat membedakan dan mengerti sistem ekonomi suatu negara pada tingkat pertama dapat dilakukan berdasarkan pembedaan faktor struktural seperti disebut di bawah ini:

1. Apakah benda-benda konsumsi diproduksi berdasarkan keinginan dari pada konsumen (Ci) atau ditentukan oleh pemerintah (Cg);
2. Apakah pemilihan pekerjaan diserahkan kepada masing-masing individu (Wi) atau apakah alokasi dari pekerja ditentukan oleh pemerintah dan penentuan pembayaran upah ditentukan sebagai suatu kebijaksanaan sosial (Wg);
3. Apakah keseluruhan tingkat tabungan yaitu bagian dari GNP yang diperuntukkan untuk pembentukan kapital

- (capital formation) ditentukan oleh masing-masing individu (Si) atau ditentukan oleh pemerintah (Sg);
4. Apakah alat-alat produksi (tenaga kerja, tanah dan modal) dimiliki dan pengaturannya oleh masing-masing individu (Oi) atau oleh pemerintah (Og).

Dari berbagai kombinasi faktor-faktor struktural di atas¹, kita dapat melihat betapa banyak kemungkinan kombinasi yang mungkin akan terjadi, belum lagi memperhitungkan kemungkinan adanya bentuk campuran dari masing-masing faktor tersebut.

Membahas seluruh kemungkinan sistem yang akan terjadi, bukan pekerjaan yang mudah, walaupun memang pada dasarnya adalah sangat bermanfaat. Tetapi sejak tulisan ini bukan dimaksudkan untuk tujuan yang demikian dan agar sampai kepada tujuan daripada tulisan ini, seluruhnya tidak akan dibahas secara terperinci. Pembahasan akan diarahkan kepada pokok-pokok yang dianggap penting, yang pada gilirannya diharapkan dapat menunjang usaha masyarakatan kembali sistem ekonomi yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

II. SISTEM KAPITALISME MURNI (Ci, Wi, Si, Oi)

Dalam sistem kapitalisme murni, perekonomian tidak dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah memenuhi kebutuhan kolektip, tetapi tidak bersaing dengan usaha swasta. Pemerintah tidak menentukan di mana anggota masyarakat bekerja, apa yang akan diproduksi dan tidak mengontrol konsumsi. Para anggota masyarakat bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan ini akan ditentukan oleh daya serap tenaga kerja tersebut. Mereka akan bebas membelanjakan pendapatannya untuk benda manapun yang mereka inginkan, dan bebas

1 Simbol-simbol yang dimaksudkan di atas, menunjukkan bentuk organisasi dari ekonomi. Dan hendaknya jangan disalah artikan dengan simbol-simbol yang biasa dipergunakan dalam perkiraan nasional (national accounting). Dengan demikian Ci dan Cg menunjukkan apakah benda-benda konsumsi diproduksi berdasarkan keinginan pihak partikulir (private preference) atau oleh pemerintah. Demikian juga simbol Si dan Sg, mereka menunjukkan apakah keseluruhan tingkat tabungan ditentukan secara partikulir atau secara publik dan tidak menunjukkan tabungan swasta atau pemerintah. Untuk lebih jelasnya lihat, Richard A. Musgrave, *Fiscal System* (New Haven and London: Yale University Press, 1969) halaman 6

untuk tidak membelanjakan pendapatannya atau menabungnya.

Dengan tidak adanya kontrol dari pemerintah (central plan), produksi menjadi tergantung kepada pihak swasta. Sehingga dengan demikian terdapat dua macam bentuk perekonomian. Pertama, para anggota masyarakat akan menerima pendapatan dengan menjual jasa-jasa dari faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Sumber-sumber pendapatan tersebut berupa upah, sewa, bunga dan dividen. Bentuk kedua adalah perusahaan yang mengkombinasikan jasa-jasa dari faktor produksi yang mereka beli dari para pemilik. Di dalam proses teknik mereka menghasilkan benda-benda dan jasa-jasa yang selanjutnya dijual. Dan benda-benda tersebut akan dibeli oleh perusahaan atau para anggota masyarakat. Unit-unit perusahaan akan menterjemahkan permintaan konsumen akan benda-benda ke dalam permintaan tenaga kerja, sumber-sumber alam dan benda-benda modal yaitu ke dalam permintaan jasa-jasa dari faktor produksi yang dimiliki oleh para anggota masyarakat. Faktor-faktor ini dapat dipergunakan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi, dan penggunaannya ditentukan oleh apa yang dinamakan "consumer's ballot". Bila permintaan terhadap komoditi berubah dan faktor lainnya tetap, maka harga akan naik. Para produser yang mengharapkan atau memperkirakan akan mendapat laba yang tinggi dapat menawarkan harga yang lebih tinggi untuk jasa-jasa dari faktor produksi. Sehingga dalam perputarannya dapat mematikan para produser yang kurang bernasib.

Seperti diutarakan di atas para konsumen dalam sistem ini bebas untuk menggunakan pendapatannya. Pilihan mereka masing-masing akan tergantung kepada, selera (dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan faktor lainnya); bagian pendapatan yang mereka inginkan untuk dibelanjakan untuk benda-benda konsumsi; harga dari benda-benda yang mereka pertimbangkan untuk dibeli. Dengan demikian, dengan adanya kesediaan mereka untuk membayar harga yang berbeda (rendah atau tinggi), para konsumen akan menentukan dan mengarahkan produksi dan penggunaan alat-alat produksi.

ANALISA

Dalam sistem ekonomi seperti ini kita akan mendapat gambaran, bahwa tingkat kebebasan dari anggota masyarakat sangat tinggi. Tetapi perlu direnungkan, apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan kebebasan tersebut. Kebebasan mengkonsumsi dan memilih pekerjaan adalah kurang berarti bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang sangat terbatas untuk dibelanjakan dan tidak berarti bagi mereka yang menganggur.

Karena pemerintah tidak melakukan kontrol, maka bila terjadi pembagian pendapatan yang pincang, pemerintah tidak akan dapat melakukan usaha penanggulangan untuk pemeratakan kepincangan dalam pembagian pendapatan tersebut. Kebebasan individu dalam sistem ekonomi seperti ini, mempunyai aspek negatif, karena tidak seorangpun akan bertanggung jawab akan kemakmuran orang lain di luar dirinya. Bila seorang tidak mempunyai pekerjaan, maka dia akan memikul segala akibatnya. Demikian juga bila suatu perusahaan bangkrut maka perusahaan tersebutlah yang akan memikul semua akibat yang timbul. Dalam sistem ekonomi seperti ini, hubungan di antara masyarakat menjadi "antagonistic" dan tidak akan harmonis. Masyarakat akan bertemu sebagai pembeli di satu pihak dan sebagai penjual di lain pihak; sebagai pekerja dan yang dipekerjakan dan bertemu sebagai saingan.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme murni, masalah ekonomi sosial akan dipecahkan melalui kompetisi dan tidak melalui "conscious cooperation". Dengan demikian kompetisi yang tajam akan dapat melahirkan monopoli dengan segala kemungkinan keburukannya. Keburukan yang dimaksudkan antara lain dapat disebutkan, kemungkinan terjadinya penghisapan terhadap pembeli dengan jalan membatasi produksi atau mempertinggi tingkat kejarangan demi untuk mencapai keuntungan yang besar oleh para pengusaha monopoli; dalam keadaan di mana terdapat pengangguran, para pemilik monopoli dapat menghisap para pekerja dengan menekan tingkat upah serendah mungkin. Dan akibat yang paling buruk adalah, monopoli itu sendiri akan dapat mematikan unsur persaingan yang berarti dalam perputarannya dapat menghancurkan sistem kapitalisme itu sendiri.

Dari uraian di atas kita dapat melihat, berbagai macam keburukan dari sistem ekonomi kapitalisme murni. Dan keburukan yang terkandung dalam sistem inilah yang menyebabkan tidak satupun negara di dunia yang menganut sistem tersebut. Beberapa negara berpendapat sistem ekonomi kapitalisme murni sedikit banyak harus diubah, atau sesedikitnya keburukan yang mungkin lahir harus dihilangkan tanpa harus mengubah prinsip yang sesuai dengan pandangan hidup bangsanya. Beberapa sistem di antaranya menarik untuk dibahas, seperti sistem ekonomi kapitalisme modern yang selanjutnya akan dibahas secara garis besar di bawah ini.

III. SISTEM KAPITALISME MODERN (Ci, Wi, Sg, Oi)

Kalau di dalam uraian di atas diperlihatkan, kombinasi dari faktor-faktor struktural adalah murni, maka dalam masyarakat kapitalisme modern seperti halnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, bentuk kombinasi murni tidak akan dijumpai lagi.

Dalam sistem kapitalisme modern, benda-benda konsumsi diproduksi berdasarkan keinginan dari para konsumen (Ci). Mereka berpendapat persaingan selamanya harus dipertahankan melalui mekanisme pasar. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, lebih dari seratus tahun yang lalu.¹ Tetapi mereka menyadari kalau semua inisiatif diserahkan kepada pengusaha swasta, maka seluruh kebutuhan konsumen yang dianggap perlu tidak akan dapat terpenuhi. Mereka mengetahui kemungkinan terjadinya apa yang dinamakan "kegagalan pasar". Kegagalan pasar akan terjadi, misalnya sebagai akibat, para pengusaha swasta enggan untuk memproduksi sesuatu benda atau jasa, karena beranggapan bahwa usaha tersebut tidak menguntungkan; atau walaupun menguntungkan maka modal yang dibutuhkan sangat besar dan tidak terpikul oleh para pengusaha swasta. Dengan demikian mereka menjadi berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan badan lain di luar para pengusaha swasta yaitu pemerintah.

1 John Stuart Mill, *Principles of Political Economy* (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc 1965), Vol. I, hal. 235

ANALISA

Mereka memberi tempat kepada pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut seperti misalnya dalam bidang, pengangkutan umum, jalan-jalan, pendidikan, air minum, pemadam kebakaran, alat-alat pertahanan. Tetapi walaupun mereka menganggap perlu pemerintah mengambil bagian dalam usaha produksi, ini tidak diartikan bahwa pemerintah yang harus memproduksinya. Pelaksanaannya dapat saja diberikan kepada pihak swasta bila itu memang cara yang lebih efisien.

Dalam sistem seperti ini, kedaulatan dan kebebasan para anggota masyarakat dipertahankan sedemikian rupa. Sehingga kedaulatan tersebut menjadi sering diartikan identik dengan keinginan dari pada anggota masyarakat secara orang-perorang. Dapat dikatakan pengertian akan arti kedaulatan inilah yang menjadi tolak pangkal perbedaan antara sistem kapitalisme modern dengan sistem sosialisme. Masyarakat kapitalisme modern beranggapan bahwa kedaulatan konsumen akan lebih terjamin hak hidupnya di dalam sistem ekonomi yang tidak dikontrol, oleh pemerintah (planned economy). Walaupun mereka tidak menyangkal bahwa dalam sistem ekonomi yang dikontrol kedaulatan konsumen masih mungkin dipertahankan. Tetapi mereka takut dalam sistem ekonomi yang dikontrol kebebasan memilih akan hilang. Hal ini tercermin dari pendapat John Mayard Keynes yang mengatakan: "Kerugian terbesar dari negara homogen atau totaliter adalah hilangnya kebebasan memilih orang-perorang".¹

Berdasarkan pandangan yang demikian, masyarakat kapitalisme modern berpendapat, bentuk yang cocok dengan itu adalah, bila alat-alat produksi dimiliki dan dilola oleh kaum swasta (Oi). Akan tetapi karena alasan-alasan seperti disebut di atas, pemilikan alat-alat produksi dan pengelolaannya oleh pihak partikular tidak dapat dipertahankan secara murni. Mau tak mau dalam sistem yang mereka maksudkan kehadiran sektor negara menjadi dibutuhkan. Sehingga dalam negara kapitalisme modern telah terdapat bentuk campuran dalam pemilikan alat-alat produksi antara pihak swasta dan negara. Tetapi dapat

1 John Mayard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (New York: Harcourt, Brace World Inc, 1965) hal. 31

dikatakan, dalam kadar terbesar alat-alat produksi tersebut masih dimiliki oleh kaum swasta.

Mengenai pemilihan pekerjaan, dalam sistem ekonomi kapitalisme modern, kebebasan memilih pekerjaan oleh masing-masing individu tetap dipertahankan (Wi). Karena mereka menyadari kebebasan tersebut tidak berarti jaminan untuk mendapat pekerjaan, pada hal yang disebut terakhir ini adalah penting sekali. Mereka menjadi beranggapan, perlu untuk mencapai full employment. Usaha tersebut dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya oleh pihak swasta tetapi juga oleh pemerintah bila memang kehadirannya dibutuhkan. Dengan demikian akan terlihat, negara juga menjadi berperan dalam menciptakan lapangan kerja atau usaha yang berhubungan dengannya, seperti antara lain proyek investasi pemerintah, latihan-latihan para pekerja. Demikian juga, penganut sistem ekonomi kapitalisme modern mengetahui, kekuatan pasar dalam keadaan tertentu terlebih dalam jangka pendek, dapat menimbulkan aksi sepihak yang dianggap merugikan pihak lain, seperti misalnya masalah harga tenaga kerja dalam keadaan perekonomian dilanda pengangguran. Melihat kemungkinan tersebut mereka menjadi menganggap perlu diterapkannya undang-undang gaji minimum, pajak atas laba, pajak pendapatan buruh, dan peraturan-peraturan lain yang dianggap ada hubungannya.

Semua negara, tanpa membedakan paham yang dianutnya, berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Tetapi usaha pencapaian tersebut akan berbeda sesuai dengan perbedaan sistem dan tujuan yang dianut oleh masing-masing negara. Seperti negara komunis, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme mengakui, salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah investment. Investment berasal dari tabungan dan dalam kehidupan nyata tidak selalu berada dalam keseimbangan yang memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Untuk beberapa alasan tertentu permintaan terhadap dana yang diperuntukkan untuk investasi adalah lebih besar bila dibandingkan dengan penawaran dana. Bila tabungan tidak dibelanjakan untuk benda-benda modal, maka permintaan total (benda-benda konsumsi dan benda-benda

ANALISA

modal) menjadi tidak memadai. Selanjutnya hal ini akan berakibat penurunan produksi, penurunan permintaan tenaga kerja atau dalam perputarannya akan melahirkan masalah pengangguran. Demikian juga, dalam keadaan tertentu, bukan tidak mungkin terjadi investasi yang berlebihan. Ia dapat terjadi, sebagai akibat pengharapan laba yang terlalu besar daripada investor dan dalam gilirannya juga akan merugikan bagi perekonomian secara keseluruhan.

Masyarakat yang menganut sistem ekonomi kapitalisme modern, menyadari kemungkinan ini. Sehingga kita akan melihat dalam kenyataannya tingkat tabungan dan tingkat investasi, tidak lagi ditentukan oleh masing-masing individu secara murni. Malah dapat dikatakan ia ditentukan oleh pemerintah baik melalui tindakan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan moneter, tindakan perpajakan atau peraturan-peraturan hukum lainnya.

Dari uraian di atas kita dapat melihat, bahwa negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme modern, masih tetap mempertahankan beberapa faktor struktural dari sistem perekonomian kapitalisme murni. Mereka yakin dalam pemuasan kebutuhan manusia, kemerdekaan masing-masing individu harus ditempatkan dalam tingkatan yang setinggi mungkin. Sejalan dengan ini mereka juga berpendapat, kebebasan tersebut akan lebih terjamin bila alat-alat produksi dimiliki dan dilola oleh pihak partikulir. Dan selanjutnya mereka beranggapan, persaingan adalah sangat penting, karena dengan persaingan inisiatip para anggota masyarakat tetap dapat dipertahankan dan konsumen akan dilindungi. Hal ini akan dapat dicapai melalui sistem pasar, yang berarti mekanisme pasar adalah esensial di dalam sistem ekonomi kapitalisme modern.

IV. SISTEM EKONOMI KOMUNISME (Cg, Wg, Sg, Og)

Di dalam sistem ekonomi komunisme, kita melihat bahwa pemerintah memiliki dan melakukan kontrol atas alat-alat produksi (tenaga kerja, sumber alam, modal). Pemerintah mempunyai wewenang penuh dalam menentukan tujuan

ekonomi; menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyaknya, kapan waktunya dan membuat peraturan-peraturan mengenai distribusi.

Kebebasan yang dinikmati seperti yang terdapat di dalam sistem kapitalisme menjadi dihapuskan, bila bertentangan dengan apa yang telah direncanakan. Dengan demikian di dalam sistem komunisme, pertentangan antara kebebasan dengan apa yang telah direncanakan akan diselesaikan dengan mengorbankan kebebasan tersebut.¹ Penganut aliran komunis berpendapat, tindakan seperti itu adalah tepat, karena didasari oleh keyakinan, bahwa di dalam sistem kapitalisme kebebasan para anggota masyarakat, juga tidak dapat dipertahankan. Mereka mencela sistem kapitalisme dengan mengatakan, sistem tersebut akan menimbulkan kepincangan di dalam pembagian pendapatan yang selanjutnya akan menimbulkan 'prulal voting'.² Dan ini berarti, kebebasan yang selalu diagung-agungkan oleh penganut sistem kapitalisme tidak benar adanya.

Dalam hubungannya dengan upah, di dalam sistem ekonomi komunisme, tingkah upah ditentukan oleh pemerintah. Bahkan sering terjadi keadaan yang ekstrem, yaitu pemerintah menentukan, di mana para anggota masyarakat harus bekerja. Memang dalam dasawarsa terakhir ini, penganut paham komunis, memberi sedikit kebebasan kepada anggota masyarakatnya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem tingkat upah yang berbeda. Para anggota masyarakat dibebaskan memilih pekerjaan yang mereka anggap memadai dengan mempertimbangkan tingkat upah yang berbeda di dalam setiap unit ekonomi. Tetapi inisiatif selalu datang dari pemerintah, dan bukan sebagai hasil dari kekuatan pasar yang sebenarnya seperti yang dijumpai di dalam sistem kapitalisme. Dengan demikian dapat dikatakan dalam sistem komunisme maka kebebasan tersebut hanya terlihat dari segi penawaran saja, yang berarti bukan kebebasan dalam artian yang sebenarnya.

1 Maurice Dobb's, *Soviet Economic Development Since 1917*, (New York: International Publishers Co, Inc, 1948)

2 Maurice Dobb's, "Economic Theory and the Problem of a Socialist Economy," *Economic Journal*, Vol 43, Dec, 1933, 588-598

ANALISA

Dalam sistem ekonomi komunisme, kita juga akan melihat, sistem harga tidak lagi menentukan arah daripada rencana. Para konsumen tidak menentukan apa yang akan diproduksi, para manajer perusahaan tidak bertindak secara bebas atas dasar harga dan biaya. Perencana ekonomi tidak akan bekerja atas dasar harga dalam menjamin apa yang dibutuhkan dalam waktu dan jumlah yang tepat. Karena para konsumen dapat dipaksa untuk menerima apa yang diproduksi, dan anggota masyarakat dapat dipaksa untuk bekerja sesuai dengan yang telah direncanakan, maka terlihat sistem ini merupakan sistem yang tidak begitu rumit. Tidak begitu rumit bila dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme modern.

Para penganut sistem ekonomi komunisme pada umumnya secara bangga mencela sistem perekonomian kapitalis. Mereka mengatakan, di dalam sistem komunisme, pemupukan kekayaan ke tangan segelintir anggota masyarakat tidak akan terjadi, atau perbedaan yang terlalu besar dalam distribusi pendapatan dengan mudah dapat dielakkan.

Tetapi untuk ini perlu dipertanyakan: "Apakah pembagian pendapatan dengan perbedaan yang wajar hanya akan dapat dicapai dengan mengorbankan kemerdekaan anggota masyarakat?" Atau dengan perkataan lain, "Apakah hasil yang dicapai di dalam hal pembagian pendapatan dapat dikatakan sebanding dengan pengorbanan kemerdekaan dan kedaulatan anggota masyarakat seperti halnya yang terjadi di Rusia?". Pertanyaan ini tentu akan dapat dijawab dengan baik, bila kita menempatkan nilai moral dari sesuatu tindakan dalam kedudukan yang benar.

Dalam uraian di atas telah dikemukakan, bahwa bukan hanya penganut komunisme yang berusaha untuk menghilangkan kepincangan dalam pembagian pendapatan. Penganut sistem perekonomian kapitalis modern juga berusaha memecahkan masalah ini. Tetapi jelas berbeda aksi yang akan mereka lakukan. Mereka akan berusaha memecahkan persoalan tersebut, tetapi dengan sejauh mungkin tidak mengorbankan kemerdekaan dan kedaulatan para anggota masyarakatnya.

Memang suatu hal yang dapat membuat tercengang para ahli ekonomi yang anti sistem komunisme, melihat kenyataan negara penganut sistem komunisme Rusia, dapat mencapai hasil ekonomi yang kelihatannya menakjubkan. Menakjubkan, karena menurut mereka sistem ekonomi komunisme tidak dapat berjalan secara efisien; atau tidak akan seproduktif sistem perekonomian yang didasarkan kepada usaha dan kemauan partikular. Mereka juga mengkritik bahwa sistem tersebut akan menuntut sistem alokasi yang konsisten, yang dalam kenyataan tidak mungkin diperhitungkan secara memadai. Tetapi walaupun Rusia berhasil mencapai tingkat kemajuan ekonomi seperti kenyataannya sekarang, itu tidak lantas berarti bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh Rusia telah berjalan secara efisien. Rusia dalam sejarahnya, sejak mulai menganut paham komunis sampai sekarang, mengalami masalah efisiensi dalam hal produksi dan alokasi sumber-sumber. Ini sebagai akibat dari proses, unit-unit ekonomi bekerja menurut target yang sudah ditentukan. Mereka tidak mempunyai kebebasan lagi untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Para manajer dari unit-unit ekonomi bekerja untuk memenuhi target yang telah ditentukan oleh biro perencana ekonomi. Sehingga dalam kenyataannya para manajer tersebut pada umumnya memberi data mengenai produksi yang dapat dicapai dengan kombinasi dari input-input tertentu tidak seperti yang seharusnya. Mereka menjadi memberi target yang lebih rendah daripada yang mungkin akan tercapai kepada biro perencana ekonomi sebelum produksi dilakukan. Apakah itu merupakan pencerminan ketakutan bila target tidak dapat dipenuhi akan menghadapi sangsi-sangsi tertentu, atau merupakan pencerminan adanya keinginan para manajer untuk mendapat penghargaan bila produksi akan dapat melampaui target yang telah ditentukan, jelas merupakan faktor dominan dan tidak dapat diabaikan.

Di samping itu Rusia juga menghadapi masalah besar dalam menjadikan usaha pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh rakyat menjadi milik pemerintah. Usaha menasionalisasikan usaha pertanian ini jelas tidak berjalan menurut kerelaan dari para petani, tetapi melalui paksaan. Memang sayangnya, kita tidak

dapat mengetahui berapa besar atau berapa banyak anggota masyarakat yang dikorbankan atau dikirim ke Siberia untuk mencapai tujuan ini.

Dengan demikian dapat dikatakan, memang suatu hal yang menakjubkan, Rusia berhasil meluncurkan satelit-satelit ke ruang angkasa, atau Rusia dari segi pertahanan sudah hampir dapat mengimbangi Amerika Serikat. Tetapi itu tidak lantas berarti bahwa tingkat kemakmuran, baik dari segi material sekalipun, Rusia telah dapat menyamai negara-negara Eropa Barat atau Amerika Serikat.

V. SISTEM SOSIALISME LIBERAL (Ci, Wi, Sg, Og)

Kalau sistem ekonomi kapitalisme modern dapat dikatakan muncul sebagai bentuk penyempurnaan dari sistem kapitalisme murni, maka sistem sosialisme liberal dapat juga dikatakan muncul sebagai bentuk penyempurnaan dari sistem ekonomi komunisme.

Untuk dapat lebih mengerti sistem ekonomi sosialisme liberal, mau tidak mau diperlukan pengetahuan mengenai ajaran Karl Marx. Ini disebabkan penganut sistem sosialisme liberal bertitik tolak dari ajaran tersebut. Marxis sebenarnya bukan merupakan teori sosialisme dan Marx tidak banyak mengutarakan mengenai sistem ekonomi. Teorinya dalam bagian terbesar hanya berhubungan dengan kapitalisme atau secara tepatnya, Marx ingin mempelajari sejarah perilaku khas dari kapitalisme sebagai suatu sistem sosial yang dalam perputarannya akan melahirkan sistem sosialisme. Marx ingin memperlihatkan, proses kapitalisme mengandung pemerasan atau penghisapan oleh suatu kelas masyarakat (kapitalis) terhadap kelas lain (pekerja). Sehingga akibat dari penghisapan ekonomi tersebut kapitalisme itu sendiri akan hancur.

Teori yang menerangkan proses penghisapan tersebut adalah teori 'nilai lebih' (surplus value) dan teori ini didasarkan

kepada teori 'nilai tenaga kerja'.¹ Marx mulai dari teori nilai, dalam mana dia mengartikan komoditi sebagai suatu artikel yang mempunyai kegunaan, merupakan hasil dari tenaga kerja manusia dan diproduksi untuk pasar. Karena Marx beranggapan bahwa komoditi adalah hanya hasil dari tenaga kerja manusia, maka dalam teorinya dia tidak memasukkan benda-benda seperti pemberian alam (tanah, tenaga air, batu bara, sumber minyak) dalam pengertian komoditi. Pandangan seperti ini berasal dari gurunya, David Ricardo, yang dalam teorinya juga beranggapan benda-benda yang jumlahnya tidak dapat diperbesar oleh tenaga manusia tidak termasuk ke dalam pengertian komoditi.

Adalah jelas, Marx di sini telah membuat kesalahan yang sangat besar, dengan memberi definisi komoditi dalam pengertian yang sangat sempit. Tetapi ia membutuhkan teori nilai tenaga kerja yang salah tersebut sebagai dasar untuk teori nilai lebih, di mana dengan yang disebut terakhir ini ia membuktikan adanya penghisapan di dalam sistem kapitalisme atau kapitalisme adalah suatu sistem perampokan dan yang menjadi mangsa adalah para pekerja.²

Walaupun secara jelas terlihat ajaran Marx dibangun berdasarkan definisi yang salah, akan tetapi para penganut ajaran sosialisme menganggap itu sebagai suatu yang benar, atau walaupun mereka melihat kelemahan tersebut, mereka tetap menerimanya. Mereka menerima ajaran tersebut sebagai suatu strategi perjuangan untuk menciptakan masyarakat sosialisme. Mereka membutuhkan ajaran Marx untuk membuktikan ketidaksempurnaan dari sistem kapitalisme. Walaupun sebenarnya dapat dikatakan tanpa ajaran Marx, kelemahan dari paham kapitalisme dapat dibuktikan.

Penganut ajaran sosialisme liberal melihat, sistem kapitalisme murni akan melahirkan kepincangan di dalam pembagian

1 Karl Marx, *Capital, A Critical Analysis of Capitalist Production* (Progress Publishers, Moscow), Vol. 1. Untuk lebih jelasnya lihat Karl Marx, *Capital, A Critique of Political Economy* (Progress Publishers, Moscow), Vol. III

2 Lihat, Joan Robinson, *An Assay on Marxian Economics* (New York: St. Martin's Press Inc, 1947)

pendapatan. Dan kepincangan tersebut menurut mereka berakar kepada terdapatnya kepincangan dalam pemilikan alat-alat produksi. Dengan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang di dalamnya terdapat pembagian pendapatan yang lebih merata, mereka berpendapat bahwa alat-alat produksi selain tenaga kerja manusia harus dimiliki dan dilola oleh negara. Produksi tidak dapat diserahkan kepada inisiatif pihak swasta tetapi negaralah yang akan menentukan apa yang akan diproduksi, berapa besarnya, kapan waktunya dan juga harganya. Mereka menggantikan sistem pemilikan individu, karena mereka beranggapan, sistem ekonomi seperti itu secara mendasar adalah buta, tidak mempunyai tujuan yang rasional dan tidak akan berhasil untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting dari mahluk manusia.

Di lain pihak mereka juga melihat, dalam sistem ekonomi komunisme, kemerdekaan dari anggota masyarakat telah dikorbankan, kedaulatan dari konsumen telah ditiadakan. Mereka beranggapan bahwa tindakan seperti itu tidak akan dilakukan di dalam sistem ekonomi sosialisme liberal. Kebebasan konsumen untuk menggunakan pendapatannya dan kebebasan para anggota masyarakat untuk memilih pekerjaan akan dipertahankan di dalam sistem yang mereka maksudkan. Negara akan menentukan produksi dari benda-benda konsumsi dan benda-benda modal dan juga menentukan harga dari benda-benda tersebut. Berdasarkan harga tersebut masing-masing unit ekonomi (milik negara) akan melakukan kombinasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan benda-benda yang dimaksudkan. Hal ini dalam gilirannya akan melahirkan permintaan akan tenaga kerja. Harga penawaran upah dengan demikian dapat berbeda, sesuai dengan perbedaan dalam kedudukan ekonomis dari unit-unit ekonomi. Sehingga dengan demikian para pekerja dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya dengan mempertimbangkan tingkat upah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja.

Dari perilaku yang demikian, kita akan melihat sistem ekonomi sosialisme liberal berbeda dengan sistem komunisme dan sistem kapitalisme. Kalau dalam sistem kapitalisme murni dan kapitalisme modern produksi didasarkan kepada keinginan

(preference) dari masing-masing individu dan harga terjadi sebagai hasil kekuatan antara permintaan dan penawaran, maka dalam sistem sosialisme liberal, produksi dan harga ditentukan sebelumnya berdasarkan keinginan pemerintah.

Dalam sistem sosialisme liberal dapat dikatakan distribusi pendapatan secara lebih merata, akan lebih mudah diciptakan, karena pendapatan anggota masyarakat di luar upah telah ditiadakan. Akan tetapi hal ini nantinya yang akan menimbulkan masalah besar dalam sistem perekonomian tersebut. Karena ajaran ini bertitik tolak dari ajaran Marx yang dalam dirinya telah mengandung kesalahan besar, maka di dalam sistem tersebut tidak diperkenankan adanya bunga dari modal. Sehingga dengan demikian tidak akan terdapat pasar modal.

Pembangunan ekonomi sudah barang tentu membutuhkan modal untuk investasi. Modal tersebut dapat berasal dari tabungan swasta atau tabungan pemerintah. Kalau bunga modal tidak diperkenankan adanya, maka jelas sumber dana yang dimaksudkan datangnya hanya dari pihak pemerintah. Dikatakan demikian, karena para anggota masyarakat yang mempunyai sisa pendapatan, tidak akan mempunyai keagairahan untuk menyimpan tabungannya di bank pemerintah, kecuali bila dipaksa atau pencurian merajalela. Dalam masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya, persoalan tersebut belum begitu serius, karena di dalam masyarakat yang demikian tingkat tabungan masyarakat masih sangat kecil sehingga peranannya di dalam usaha pembangunan itu sendiri masih belum begitu penting. Tetapi di dalam masyarakat yang tingkat pendapatannya sudah cukup tinggi, dan tingkat tabungan mereka telah cukup besar, persoalannya akan menjadi sangat serius. Bila dana pembangunan hanya dapat diharapkan dari sektor pemerintah, maka jelas pembangunan itu hanya akan dapat berjalan secara lamban. Karena semua dana yang telah tersedia tidak dapat dipergunakan seluruhnya. Dan seandainya pemerintah, untuk menutupi kekurangan tersebut melakukan tindakan penciptaan kredit atau menambah uang yang beredar, maka akibatnya adalah tekanan inflasi. Dalam situasi seperti ini, bila pemerintah

tidak mengubah harga yang telah ditentukan sebelumnya, maka para konsumen akan menyerbu pasar dan pasti akan menimbulkan keributan sosial. Karena dapat dipastikan sebahagian anggota masyarakat menjadi tidak kebagian benda-benda yang mereka inginkan. Dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu pemerintah akan bertindak dan tindakan yang akan dilakukan akan mengambil bentuk penjatahan. Kalau tindakan seperti ini yang akan dilakukan tentu akan menjadi pertanyaan, "Apakah kedaulatan dan kemerdekaan para konsumen masih dapat dipertahankan hak hidupnya di dalam sistem seperti ini?"

Kiranya perlu ditekankan, tanpa suatu pasar modal sistem ini tidak akan dapat berjalan sesuai dengan harapan sebelumnya. Dalam uraian di atas telah dikemukakan, masalah yang dihadapi dalam sistem sosialisme liberal memang belum begitu rumit bila pendapatan anggota masyarakat masih rendah. Sehingga dapat dipahami, mengapa suara penganut sistem tersebut lebih nyaring kedengarannya oleh masyarakat yang masih rendah tingkat pendapatannya.

Melihat kelemahan di atas para penganjur sistem ekonomi sosialisme liberal, menjadi tidak menyangkal perlunya bunga modal untuk dimasukkan di dalam perhitungan. Tetapi mereka berpendapat, bahwa tingkat bunga selamanya akan ditentukan oleh pemerintah. Bila demikian halnya, kemungkinan timbulnya inflasi, deflasi, stagflasi, seperti kemungkinan yang bisa terjadi dalam negara yang menganut sistem kapitalisme modern selalu ada. Jika pemerintah misalnya menentukan tingkat bunga yang terlalu rendah, maka unit-unit ekonomi akan mengajukan permohonan kredit yang lebih besar dari dana yang tersedia. Dan bila pemerintah bertindak untuk menutupi ketimpangan dalam permintaan dan penawaran dana investasi dengan melakukan tindakan penciptaan kredit, maka akibatnya adalah inflasi. Dan pengatasannya tentu sama dengan yang telah diutarakan sebelumnya yaitu tindakan penjatahan.

Dalam bukunya,¹ penganut dan pelopor sistem ekonomi

1 Oscar Lange, *Essays on Economic Planning* (Asia Publishing House, Calcuta, Second Edition, 1967). Di samping itu lihat juga Oscar Lange and Fred M. Taylor, *On the Economic Theory of Socialism* (Mcgraw-Hill Book Company, New York-Toronto-London 1964) dan Oscar Lange, *Political Economy* (Pergamon Press, Oxford-London-New York-Paris, 1963)

sosialisme liberal, Oscar Lange, mengemukakan, bahwa di dalam sistem ekonomi yang mereka pelopori, pemilikan dan pengelolaan alat-alat produksi oleh pihak partikular masih diperkenankan adanya. Tetapi bila dianalisa lebih mendalam, pernyataan tersebut hanya merupakan taktik perjuangan untuk dapat mewujudkan masyarakat seperti yang mereka idamkan. Dikatakan demikian, karena dia memberi persyaratan untuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh pihak partikular sebagai berikut:

1. Persaingan bebas harus berlaku di dalamnya
2. Alat-alat produksi yang dimiliki oleh para produsen partikular atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham dalam perusahaan negara tidak boleh terlalu besar karena dapat menimbulkan ketidaksamaan (kepincangan) dalam pembagian pendapatan
3. Dalam jangka panjang harga dari barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan kecil tersebut tidak diperkenankan lebih mahal dari harga benda-benda yang dihasilkan oleh perusahaan yang berskala besar.

Dari ketiga persyaratan di atas jelas terlihat, dalam jangka panjang, memang perusahaan-perusahaan yang berskala kecil tidak akan mungkin lagi mengimbangi perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Ini berarti cepat atau lambat usaha tersebut pasti akan dinasionalisasikan. Tetapi, mengapa Oscar Lange merasa perlu untuk mengemukakan hal tersebut? Memang selain ahli ekonomi dia dapat juga dinilai sebagai seorang ahli strategi. Sebagai seorang ahli strategi dia menyadari, bila pemilikan dan pengelolaan alat-alat produksi oleh perusahaan-perusahaan kecil, seperti halnya usaha pertanian, dihapuskan sekaligus, maka sistem yang dia cita-citakan hampir tidak mungkin mendapat dukungan masyarakat. Padahal pendukung utama yang dia harapkan, adalah mereka yang memperoleh pendapatan yang rendah yang pada umumnya bergerak di sektor pertanian atau menjalankan usaha secara kecil-kecilan. Di lain pihak dia juga memperkirakan, bila semua usaha ini dinasionalisasikan sekaligus, maka pemerintah pasti akan menjadi kewalahan. Karena aparat pemerintah tidak akan mampu menanganinya secara sekaligus.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, dalam sistem sosialisme liberal, pembagian pendapatan secara lebih merata akan

dapat dicapai secara lebih mudah. Akan tetapi sistem tersebut juga akan menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh negara yang menganut sistem kapitalisme modern. Bahkan dalam usaha penanggulangan masalah yang timbul, seperti masalah produktivitas dan khususnya masalah harga, tindakan yang akan diambil cenderung sama seperti yang ditempuh oleh kaum komunis, yaitu dengan mengorbankan kedaulatan dan kemerdekaan daripada anggota masyarakat.

Dari keempat sistem ekonomi yang telah diuraikan di atas, kita dapat melihat, masing-masing sistem mempunyai kebaikan dan keburukan. Dan ini kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam usaha mempelajari sistem ekonomi Indonesia yang akan dibahas di dalam uraian di bawah ini.

VI. SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sungguh sangat sering kita mendengar atau membaca tulisan-tulisan yang menyatakan, sistem ekonomi Indonesia bukan merupakan sistem ekonomi kapitalisme, bukan merupakan sistem ekonomi sosialisme atau komunisme. Pernyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, kalau bukan kapitalisme, komunisme atau sosialisme, lalu sistem ekonomi Indonesia bagaimana seharusnya dan sebenarnya. Memberi jawaban terhadap pertanyaan ini, bukan pekerjaan yang mudah, karena dalam dirinya pertanyaan tersebut telah menuntut pengetahuan mengenai sistem ekonomi kapitalisme, komunisme, sosialisme dan pengetahuan serta keyakinan terhadap sistem ekonomi Indonesia. Tanpa pengetahuan mengenai sistem ekonomi kapitalisme, komunisme dan sosialisme, jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak akan mungkin diberikan secara memadai. Hal ini perlu dicamkan dalam hati, karena dalam rangka usaha pemasyarakatan kembali sistem perekonomian Indonesia, dapat dipastikan perihal tersebut akan selalu muncul.

Robinson Crusoe, tidak akan memikirkan, apakah sistem ekonominya termasuk sistem kapitalis atau sosialisme. Bagi dia tidak ada artinya konsep kapitalisme atau komunisme. Dia tidak

akan memikirkan masalah harga, inflasi, deflasi atau stagflasi. Perekonomiannya tidak akan membutuhkan uang, tindakan pemerintah, kebijaksanaan moneter dan tindakan perpajakan. Tetapi di dalam kehidupan bernegara mau tidak mau semua perihal di atas perlu dipikirkan. Konsep kapitalisme, sosialisme dan komunisme menjadi mempunyai arti, karena konsep tersebut merupakan salah satu bentuk kemungkinan sistem ekonomi.

Dalam uraian di atas telah diperlihatkan betapa banyak sistem ekonomi yang mungkin terjadi, hanya dengan membedakan faktor-faktor struktural. Berdasarkan perbedaan keempat faktor struktural yang telah disebutkan di atas, selanjutnya kita akan lebih mudah mengerti sistem ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia, secara garis besar telah dirumuskan di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara. Rumusan yang mengatur sistem ekonomi Indonesia dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang bunyinya, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"
2. Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri atas tiga ayat yaitu,
 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
3. GBHN 1978 (Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1978) yang menyatakan, Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

ANALISA

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permupakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap Warga Negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
8. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut:

1. Sistem "free fight liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia
2. Sistem "etatisme" dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Dari keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur sistem ekonomi Indonesia, dapat dikatakan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjadi inti dan tolak pangkalnya. Perumusan tersebut sungguh fleksibel sifatnya. Sehingga mungkin diartikan berlain-

an dengan yang seharusnya, walaupun ia tidak selalu akan bertentangan. Rumusan tersebut berbunyi, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan". Ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, "Apa yang sebenarnya dan yang seharusnya yang dimaksudkan dengan asas kekeluargaan tersebut?". Sudah barang tentu untuk dapat memberi jawaban secara memadai, rumusan tersebut tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri dengan perumusan-perumusan lainnya. Dia tidak boleh dipisahkan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Bila rumusan tersebut ditafsirkan secara terpisah sendiri-sendiri, sangat besar kemungkinannya menghasilkan akibat yang tidak baik, yang dalam perputarannya mungkin akan menghancurkan sistem itu secara keseluruhan. Dengan demikian perlu ditekankan, menafsirkan rumusan tersebut memang bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi walaupun demikian, mau tidak mau hal ini perlu diperjelas. Karena hanya dengan demikian para anggota masyarakat akan dapat mengerti dan menyadari fungsinya masing-masing di dalam kehidupan bernegara. Tanpa penjelasan, dapat dipastikan akan menimbulkan bahaya yang bahkan dalam gilirannya dapat menghancurkan kehidupan bernegara dari masyarakat Indonesia.

Untuk dapat lebih mengerti rumusan tersebut, pertama kita harus kembali melihat, apa yang menjadi faktor pendorong bagi anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam uraian terdahulu telah diutarakan, keseluruhan kegiatan ekonomi dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut oleh masyarakat Indonesia dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. Kebutuhan badaniah yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidup
2. Kebutuhan yang berasal dari kenyataan bahwa kita hidup bersama di dalam suatu masyarakat
3. Kebutuhan yang timbul sebagai hasil hubungan antara anggota masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Kalau ketiga bentuk kebutuhan di atas diakui dan diterima adanya, maka sekarang kita akan melihat bagaimana usaha

ANALISA

pemenuhan dan pemenuhan kebutuhan itu akan dilakukan oleh anggota masyarakat.

Usaha pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan berdasarkan keinginan masing-masing anggota masyarakat secara terpisah sendiri-sendiri. Atau secara jelasnya aksi yang akan dilakukan didasarkan kepada keinginan daripada anggota masyarakat secara independen. Dalam sistem yang demikian maka unit-unit ekonomi akan bekerja atau akan melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan keinginan atau perjumlahan keinginan daripada anggota masyarakat. Bila perilaku yang demikian yang ditempuh, maka semua kegiatan ekonomi akan berjalan ke arah yang tidak dapat diketahui secara jelas.

Sistem ekonomi Indonesia jelas tidak menganut sistem yang demikian. Sistem tersebut mempunyai kelemahan besar, karena kebutuhan yang berasal dari kenyataan bahwa kita hidup di dalam suatu masyarakat menjadi ditiadakan atau sesedikitnya menjadi tidak mempunyai arti. Kita dapat membayangkan dalam sistem seperti itu, semua alat pemuas kebutuhan akan dinilai secara subyektif dan ini akan berwujud suatu sistem yang di dalamnya kemauan orang-perorang yang menjadi pusat dari segala kegiatan ekonomi.

Usaha pemenuhan kebutuhan di dalam sistem ekonomi Indonesia, perlu dicamkan di dalam hati, didasarkan kepada keinginan dari seluruh masyarakat atau jelasnya, produksi dilakukan berdasarkan "preference" dari seluruh anggota masyarakat; dan preference seluruh anggota masyarakatlah yang menjadi inti dari segala kegiatan ekonomi. Tentu akan menjadi pertanyaan, bagaimana preference masyarakat diketahui dan bagaimana preference masyarakat akan dibentuk. Jawabannya secara jelas sudah dirumuskan berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia di dalam Sila Keempat dari Panca Sila yang isinya menyatakan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".

Dengan demikian dapat dikatakan, semua kegiatan ekonomi di dalam sistem ekonomi Indonesia akan dilakukan berdasarkan suatu arah yang telah ditentukan sebelumnya yang diben-

tuk melalui proses demokrasi. Hal ini berarti, kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi sudah dibatasi. Pembatasan dalam hal ini bukan berarti kedaulatan dan kemerdekaan dari para anggota masyarakat dimatikan, tetapi kebebasan tersebut ditempatkan sesuai dengan keinginan seluruh anggota masyarakat. Hal ini perlu ditekankan, karena nilai kebebasan seperti inilah yang membedakan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem kapitalisme atau komunisme.

Kalau di dalam uraian di atas telah dikemukakan, bahwa produksi oleh masyarakat Indonesia dilakukan berdasarkan preference dari seluruh anggota masyarakat, maka selanjutnya usaha produksi itu sendiri harus dilakukan sejalan dengannya. Untuk ini sudah barang tentu dibutuhkan kerja sama. Kerja sama dibutuhkan bukan hanya untuk mencapai efisiensi dalam produksi. Tetapi kerja sama juga dibutuhkan untuk mencapai keharmonisan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Bagaimana kerjasama itu akan berjalan tentu sangat tergantung kepada pemilikan dan pengelolaan daripada alat-alat produksi.

Seperti kita ketahui, walaupun produksi akan dilakukan berdasarkan keinginan dari seluruh anggota masyarakat dalam bentuk suatu kesatuan, ini tidak berarti seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah. Dan ini tidak berarti, bahwa semua alat-alat produksi harus dimiliki oleh pemerintah. Bahkan adalah mungkin, tujuan seperti disebut di atas dapat dicapai, dalam mana alat-alat produksi keseluruhannya dimiliki dan dilola oleh para pengusaha partikular. Dalam bentuk seperti ini, pemerintah akan bertindak sebagai agen. Pemerintah akan membeli semua benda-benda dan jasa-jasa hasil produksi, memberi subsidi, mengenakan pajak dan selanjutnya menyalurkan benda dan jasa-jasa tersebut kepada konsumen baik melalui mekanisme pasar atau melalui penjatahan.

Sistem ekonomi Indonesia, tidak menganut sistem yang demikian. Alat-alat produksi selain dimiliki oleh para anggota masyarakat secara partikular juga dimiliki oleh negara. Dengan demikian sistem pemilikan alat-alat produksi dan penggunaannya merupakan bentuk campuran Oi dan Og.

ANALISA

Dalam uraian mengenai sistem kapitalisme di atas telah dikemukakan, pemilikan dan pengelolaan alat-alat produksi oleh negara dianggap perlu di dalam sistem kapitalisme modern, pada dasarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya kolektif (pertahanan, keamanan, administrasi) dan untuk memenuhi kebutuhan akan benda dan jasa-jasa, yang tidak dapat diproduksi oleh pihak swasta atau akibat adanya kegagalan pasar.

Di dalam sistem ekonomi Indonesia, pemilikan dan pengelolaan alat-alat produksi oleh negara dirasakan perlu, karena didorong oleh berbagai faktor yang lebih luas dan kompleks sifatnya. Faktor-faktor tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di mana terjadi kegagalan pasar, bila hanya mengharapkan usaha dari para pengusaha partikular (irigasi, jalan-jalan, pengangkutan, jembatan-jembatan, pemadam kebakaran dan sebagainya)
2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya kolektif dan yang diperlukan demi ketahanan negara (militar, polisi, jasa-jasa dari penegak hukum dan lain-lain)
3. Untuk menjamin agar seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi dapat berjalan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya atau agar seluruh kegiatan ekonomi selamanya berlangsung sesuai dengan keinginan dari anggota masyarakat secara keseluruhan.

Untuk faktor pertama dan kedua, kiranya tidak sulit untuk dapat dimengerti. Tetapi untuk faktor yang disebutkan terakhir ini dirasakan perlu untuk ditelaah secara lebih terperinci.

Dalam uraian di atas telah dikemukakan, bahwa kebebasan para anggota masyarakat selamanya dipertahankan dalam batas-batas yang telah disepakati. Di dalam batasan tersebut para anggota masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi. Para anggota masyarakat bebas berinisiatif, berkreasi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki. Akan tetapi dalam kenyataannya kebebasan tersebut sering menjurus mengakibatkan

ketidakseimbangan, seperti antara lain dapat disebutkan, ketidakseimbangan dalam harga, pembagian pendapatan, alokasi sumber-sumber dan penggunaan tenaga kerja. Sehingga untuk menghilangkan ketidakseimbangan tersebut, perwakilan masyarakat itu sendiri (negara) diharapkan untuk berperan agar tujuan yang telah disepakati dapat dicapai secara harmonis. Dalam hal ini pemerintah akan mengarahkan dan memberi bimbingan. Dalam perwujudannya pemerintah dapat bertindak secara langsung seperti penentuan tingkat bunga dan juga secara tidak langsung seperti membuat peraturan-peraturan tertentu. Tindakan yang berbentuk langsung tersebut sifatnya dapat kompetitif atau komplementer. Kompetitif dimaksudkan bukan untuk mematikan usaha swasta, tetapi kompetitif dimaksudkan misalnya untuk merangsang unit-unit ekonomi partikular bekerja secara efisien. Memang perlu disadari, tindakan pemerintah, tidak luput dari kesalahan. Bahkan bukan tidak mungkin, tindakan pemerintah justru berakibat lebih merusak ketidakseimbangan yang telah ada. Tindakan moneter misalnya, bila dilakukan secara tidak tepat dapat mengakibatkan inflasi, deflasi ataupun stagflasi. Ini memberi gambaran betapa penting untuk menciptakan dan membina hubungan yang erat antara unit-unit ekonomi swasta dengan pemerintah.

Dari uraian di atas kita mendapat gambaran, kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam sistem ekonomi Indonesia, dapat menghasilkan distribusi pendapatan secara tidak merata. Berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi adalah jelas bukan hanya karena adanya perbedaan dalam pemilikan alat-alat produksi walaupun ia merupakan faktor yang sangat menentukan.

Pembagian pendapatan secara tidak merata, perlu dicamkan di dalam hati, "tidak buruk" sepanjang ia mencerminkan kemakmuran yang lebih merata dan optimal daripada seluruh anggota masyarakat. Ini berarti, pembagian pendapatan secara merata pada hakekatnya "bukan merupakan tujuan". Dikatakan demikian karena, "guna dari setiap satuan pendapatan, bagi setiap orang pada kenyataannya adalah berbeda". Yang menjadi tujuan adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

ANALISA

kat secara lebih merata secara keseluruhan. Dan kalau kita melihat di negara komunis sekalipun pembagian pendapatan secara merata bukan merupakan tujuan. Tetapi tidak dapat disangkal, adanya kepincangan dalam pembagian pendapatan di kalangan anggota masyarakat akan menyebabkan keributan sosial, bahkan sering menjadi penyebab hancurnya kehidupan bernegara itu sendiri. Demikian juga, adalah tidak mungkin untuk mencapai kemakmuran secara lebih merata, bila pembagian pendapatan itu sendiri adalah pincang. Dengan dasar pemikiran yang demikian, maka dirasakan perlu untuk menghilangkan kepincangan dalam pembagian pendapatan. Dengan dasar pemikiran yang demikian juga, dirasakan perlu pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat.

Dalam negara-negara yang sedang membangun, kepincangan dalam pembagian pendapatan adalah merupakan gejala yang umum. Dan ini merupakan masalah sosial seperti yang dialami oleh Indonesia. Berbagai macam tindakan sering dikemukakan untuk mengatasi masalah tersebut, di antaranya adalah sistem perpajakan yang progresif. Tetapi penerapan tindakan tersebut di Indonesia perlu dilakukan secara berhati-hati. Berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan sebelumnya. Pertama, tindakan tersebut hendaknya jangan menjadi berwujud, mengambil sebagian pendapatan mereka yang berpenghasilan tinggi hanya untuk memuaskan mereka yang berpenghasilan rendah, tanpa memperhitungkan asas keadilan. Perlu ditandaskan, sistem ekonomi Indonesia disusun bukan berdasarkan falsafah 'Robin Hood'. Kedua, di dalam negara yang sedang membangun, kenyataan membuktikan, hampir seluruh tabungan masyarakat berasal dari mereka yang berpenghasilan tinggi. Sehingga penerapan pajak pendapatan yang progresif dapat berakibat negatif terhadap pembangunan itu sendiri.¹ Kedua alasan yang disebut di atas memberi gambaran, betapa penting untuk mengetahui secara mendalam, apa yang menjadi penyebab terdapatnya kepincangan dalam pembagian pendapatan di Indonesia dan bagaimana gambaran yang sebenarnya. Tanpa penge-

1 Richard A. Musgrave/Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (Second Edition, McGraw-Hill, Kogakusha Ltd, 1976), chapter 34. Di samping itu lihat juga W.A. Lewis, *The Theory of Economic Growth* (Homewood, 111; Irwin), chapter 5

tahuan yang mendalam mengenai hal ini, dapat dikatakan tindakan penanggulangannya akan sangat sulit.

Kalau kita melihat, di dalam sistem ekonomi Indonesia, persaingan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Persaingan itu sendiri adalah baik, sepanjang ia tidak mengganggu keseimbangan yang diharapkan. Persaingan dalam sistem ekonomi Indonesia adalah berbeda dengan persaingan yang berlaku di negara kapitalis. Kalau di negara kapitalis, hancurnya saingan dapat dianggap merupakan suatu hasil dari proses dan layak. Maka bagi Indonesia hancurnya saingan merupakan beban dari seluruh masyarakat. Luka daripada saingan merupakan luka daripada unit-unit ekonomi secara keseluruhan. Persaingan dalam sistem ekonomi Indonesia adalah merupakan alat untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan demikian dapat dikatakan persaingan di dalam sistem ekonomi Indonesia diperlukan misalnya untuk mencapai efisiensi, alokasi sumber-sumber secara optimal, akan tetapi persaingan yang berakibat merusak keseimbangan perlu dihindarkan. Karena pada dasarnya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Inilah salah satu pengertian asas kekeluargaan yang dirumuskan di dalam Pasal 33 UUD 1945.

Persaingan pada dasarnya akan menjurus ke arah saling mematikan, bila 'bargaining position' salah satu pihak daripada mereka yang bersaing adalah lemah bila dibandingkan dengan pihak lainnya. Seperti diketahui, setiap anggota peserta ekonomi, melakukan transaksi di dalam dua macam pasar (sebagai konsumen dan sebagai produsen) dan di dalam setiap pasar pembeli dan penjual akan berhadapan dalam dua front; berhadapan dengan orang atau badan dengan siapa ia melakukan bargaining dan berhadapan dengan saingannya. Bila kompetisi kuat di dalam satu segi dari pasar (misalnya di antara pekerja), tetapi lemah di segi yang lain (di antara mereka yang mempekerjakan), maka mereka yang berada dalam posisi kompetisi yang lemah akan memperoleh keuntungan dalam bargaining. Hal ini telah dikemukakan sebelumnya secara jelas oleh Adam Smith.¹ Kalau kita mempelajari keadaannya di Indone-

¹ Adam Smith, *The Wealth of Nations* (London: Methuen & Company Ltd), Vol. I, book 1, chapter 8

sia, kita akan mengetahui, persaingan di antara para pekerja dalam bagian terbesar¹ adalah tajam (kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan belum memadai), sedang persaingan di antara pemakai tenaga kerja tidak begitu kuat (misalnya karena masih banyak kemungkinan atau pilihan dalam melakukan kombinasi daripada alat-alat produksi), sehingga dalam bargaining, dalam bagian terbesar lebih menguntungkan para pemakai tenaga kerja. Tetapi gambaran seperti ini, hendaknya jangan diartikan, bahwa para pemakai tenaga kerja di Indonesia, melakukan penghisapan terhadap para pekerja. Sebelum sampai kepada kesimpulan seperti itu masih perlu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksudkan bukan hanya akan mencakup salah satu segi (misalnya hanya melihat dari segi gaji pekerja atau jaminan sosial), tetapi penyelidikan hendaknya secara lebih menyeluruh.

Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan GBHN 1978 (khususnya ciri positif nomor 5 dari demokrasi ekonomi) dirumuskan, "kebebasan memilih pekerjaan oleh masing-masing warga negara dijamin". Ini berarti pemerintah Indonesia tidak akan menentukan (melalui paksaan) di mana para anggota masyarakatnya akan bekerja. Tetapi rumusan tersebut tidak berarti, bahwa setiap warga negara dijamin untuk mendapat pekerjaan. Hal ini perlu ditekankan, karena pengalaman telah menunjukkan rumusan tersebut sering disalahartikan. Dalam keadaan pengangguran hendaknya disadari, hak akan pekerjaan tidak selalu dibarengi oleh hak mendapat pekerjaan.

Tetapi sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, usaha untuk menciptakan agar hak akan pekerjaan menjadi berbarengan dengan hak mendapat pekerjaan dan usaha untuk menghilangkan akibat negatif daripada bargaining serta persaingan perlu dilakukan. Untuk hal yang disebut pertama adalah jelas dapat dicapai melalui pembangunan. Dan pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang bertujuan untuk mencapai full employment. Untuk kedua hal yang disebut terakhir

1 Dalam beberapa tahun terakhir ini diketahui tenaga kerja dengan kualitas tertentu (misalnya tenaga ahli-ahli teknik) tidak memenuhi kebutuhan. Ini berarti bahwa posisi mereka tidak lemah atau persaingan di antara mereka tidak tajam, bahkan mungkin sebaliknya.

ini berbagai macam tindakan yang dapat dilakukan, misalnya dengan menerapkan peraturan gaji minimum, peraturan perpajakan atau peraturan-peraturan hukum lainnya.

Dari kenyataan bahwa sampai sekarang, organisasi buruh Indonesia masih lemah, maka dirasakan perlu usaha yang bertujuan untuk memperkuat organisasi atau serikat buruh itu sendiri. Sehingga posisi mereka dalam bargaining sesedikitnya dapat diperkuat. Demikian juga halnya, dalam proses ekonomi, sering terjadi para konsumen menjadi dirugikan. Sehingga dapat dikatakan sudah waktunya bagi Indonesia untuk membentuk dan membina organisasi konsumen seperti yang dianjurkan oleh John Kenneth Galbraith.¹ Tetapi untuk ini kiranya yang lebih penting adalah kita mengharapkan kesadaran mereka yang mempunyai posisi yang kuat agar mereka tidak mempergunakan kekuatan mereka tanpa menginsyafi asas kekeluargaan tersebut.

Dalam masyarakat kapitalisme sering terlihat, monopoli lahir sebagai hasil dari proses persaingan yang saling mematikan. Tetapi sejak pertengahan abad ke-20 dapat dikatakan monopoli itu sendiri lahir bukan hanya disebabkan oleh persaingan seperti disebut di atas, tetapi ia sering lahir justru karena adanya usaha untuk menghindarkan persaingan (Trust, Kartel). Memang tidak selamanya monopoli itu adalah buruk. Sehingga adalah tepat, monopoli yang tidak dikehendaki dalam sistem ekonomi Indonesia adalah monopoli yang merugikan kepentingan masyarakat. Berbagai macam ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengukur keburukan tersebut. Misalnya monopoli adalah jelas buruk, bila ia akan merusak alokasi sumber-sumber, merusak sistem harga atau merugikan para konsumen. Demikian juga monopoli adalah buruk, bila para pemilik usaha monopoli tersebut menjadi mempunyai hak istimewa (privilege) yang dapat merusak sistem demokrasi.²

Dalam uraian di atas telah dikemukakan, perwakilan masyarakat (pemerintah) melakukan tindakan pengarahan. Tindakan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tindakan mempengaruhi pasar. Tindakan mempengaruhi pasar dilakukan karena sistem ekonomi Indonesia menganut sistem

1 John Kenneth Galbraith, *American Capitalism: The Concept of Countervailing Power* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1952), chapter 9, 10

2 Pembahasan mengenai hak privilege ini secara terperinci dapat dilihat dalam Charles E. Linblom, *Politics and Market* (Basic Book, Inc. Publishers, New York, 1977), chapter 13

ANALISA

pasar, dalam mana harga terjadi sebagai hasil proses permintaan dan penawaran. Ini berarti, sistem ekonomi Indonesia tidak seperti sistem sosialisme liberal, dalam mana harga ditentukan oleh pemerintah sebelum produksi dilakukan. Demikian juga, kita menyadari ketidakseimbangan dalam pasar uang dan pasar modal sering menyebabkan usaha pembangunan tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, untuk dapat mencapai tujuan pembangunan seperti yang diharapkan, maka wewenang untuk menentukan tingkat bunga diserahkan kepada pemerintah, yang berarti kita memilih bentuk Sg.

Memang bangun perusahaan yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, seperti yang telah dirumuskan di dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, adalah kooperasi. Kooperasi dalam pengertian, "usaha bersama yang dilakukan oleh beberapa orang tertentu, dalam mana hasil daripada usaha tersebut dibagikan kepada seluruh anggota". Tetapi perlu untuk disadari, mewujudkan bentuk usaha seperti itu membutuhkan waktu. Karena ia hanya dapat diwujudkan di dalam sistem ekonomi Indonesia melalui suatu proses. Proses yang mungkin memakan waktu lebih dari beberapa generasi. Dikatakan demikian, karena dalam usaha pencapaiannya, kedaulatan dan kemerdekaan anggota masyarakat selamanya harus dipertahankan. Dengan demikian hendaknya kita jangan menjadi 'utopianist' dan reaksioner. Dalam negara komunis, tujuan seperti itu mungkin dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Tetapi negara Indonesia bukan negara komunis, bukan negara yang menganut sistem 'etatisme' atau otoriter. Kita mengharapkan bentuk yang diidamkan tersebut lahir dari kesadaran para anggota masyarakat.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, sistem ekonomi Indonesia berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme murni, kapitalisme modern, sosialisme liberal dan komunisme. Perbedaan dalam sistem ekonomi, pada hakekatnya sebagai akibat terdapatnya perbedaan dalam pandangan hidup.

Di dalam hubungannya dengan faktor-faktor struktural, sistem ekonomi Indonesia mempunyai persamaan dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam sistem ekonomi Indonesia benda-benda konsumsi diproduksi berdasarkan keinginan dari konsumen (Ci); pemilihan pekerjaan diserahkan kepada masing-masing individu (Wi); seluruh tingkat tabungan ditentukan oleh pemerintah (Sg) dan pemilikan serta pengelolaan alat-alat produksi adalah bentuk campuran yaitu sebahagian oleh pemerintah dan sebahagian oleh pihak partikulir (campuran Oi dan Og).

Dalam sistem ekonomi Indonesia, perwakilan masyarakat (pemerintah) menghadapi tugas yang berat. Ini sebagai akibat, dalam sistem tersebut pemerintah dituntut berperan secara lebih banyak dan di lain pihak dalam melakukan peranannya mereka harus tetap mempertahankan dan menjamin kedaulatan serta kebebasan daripada anggota masyarakat.

Kepincangan dalam pembagian pendapatan, merupakan masalah serius bagi Indonesia sesedikitnya dalam jangka pendek. Masalahnya menjadi serius, pertama, karena usaha penanggulangannya memang sulit dan tanpa tindakan yang berhati-hati dapat berakibat sangat buruk. Kedua, terdapatnya kepincangan dalam pembagian pendapatan menyebabkan sistem ekonomi Indonesia sangat rawan kedudukannya terhadap pandangan hidup komunisme. Sebab dengan terdapatnya kepincangan dalam pembagian pendapatan, 'suara penganut aliran komunisme menjadi lebih nyaring kedengarannya bagi masyarakat Indonesia'.

Dengan demikian, adalah sangat perlu untuk mengetahui dalam setiap waktu bagaimana sebenarnya gambaran pembagian pendapatan di Indonesia dan apa yang merupakan faktor penyebabnya. Hendaknya pengetahuan mengenai hal tersebut mendekati kenyataan yang sebenarnya dan bukan hanya berdasarkan perkiraan yang tanpa didukung oleh suatu penyelidikan yang dianggap memadai.

Bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia adalah koperasi. Tetapi pengertian koperasi itu

ANALISA

sendiri hendaknya jangan diartikan dalam pengertian yang sempit, terlebih pengertian yang bersifat subyektif. Dan hendaknya dicamkan dalam hati mewujudkan bentuk usaha yang demikian membutuhkan proses yang memakan waktu yang lama. Tetapi walaupun demikian falsafahnya perlu dipupuk dan tetap diperkembangkan.

Pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya, tidak akan luput dari kemungkinan membuat kesalahan. Ini berarti untuk memperkecil kemungkinan membuat kesalahan tersebut, selamanya dibutuhkan hubungan yang erat antara pemerintah dengan para pengusaha partikulir. Di lain pihak usaha memasyarakatkan kembali sistem ekonomi Indonesia perlu dilakukan secara efisien dan efektif. Karena kesalahan sering terjadi atau akibatnya menjadi buruk karena anggota masyarakat tidak mengetahui sistem yang dianut, padahal dapat dikatakan, "tidak ada suatu sistem ekonomi yang betul-betul sempurna".

